

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan, oleh karena itu diharapkan segala tindakan dan perbuatan harus berdasarkan atas hukum dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pula. Masalah hubungan hukum dan masyarakat sekarang ini mulai banyak dibicarakan di dalam masyarakat, oleh karena itu merupakan salah satu kebutuhan dalam kehidupan sosial di manapun manusia berada di dunia ini.

Interaksi sosial sesama manusia itu ada kalanya menyebabkan konflik di antara mereka, sehingga salah satu pihak harus mempertahankan haknya dari pihak lainnya, atau memaksa pihak lain itu melaksanakan kewajibannya. Mengingat potensi munculnya konflik dalam hubungan antar manusia dibentuklah norma-norma hukum tertentu yang bertujuan menjaga ketentraman, keadilan, dan perlindungan hak dalam suatu masyarakat. Oleh karenanya meskipun manusia sebagai makhluk sosial, tetapi kepentingan bersifat pribadi sebagai suatu individu tetap dimiliki selama tidak melanggar hak individu lain dalam masyarakat. Dengan demikian hukum sebagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi konflik.

Mengenai hukum yang mengatur hubungan antara masyarakat satu dengan yang lain secara pribadi atau individu sering disebut sebagai hukum perdata, yaitu suatu kumpulan peraturan yang mengatur tentang hubungan antara individu satu dengan yang lain mengenai masalah pribadi atau privat. Dalam

hukum perdata itu sendiri sebenarnya mengatur berbagai macam masalah yaitu tentang orang, benda, pembuktian, serta daluwarsa.

Ada salah satu masalah yang nantinya akan menjadi bahan penulis dalam penelitian ini, yang juga diatur dalam KUHPerdata tentang pelaksanaan sita jaminan terhadap barang milik tergugat sebagai jaminan dalam satu perkara perdata di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta. Dalam realitas yang ada sekarang ini sering didengar tentang istilah hutang piutang dimana biasanya seseorang yang memberikan pinjaman(piutang) sering disebut sebagai kreditur. Sedangkan orang yang meminjam (berhutang) disebut sebagai debitur.

Seiring dengan perkembangan jaman yang menuntut ketersediaan modal kerja yang cukup untuk berlangsungnya suatu usaha yang menimbulkan adanya hutang piutang. Hutang sendiri secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu kewajiban yang melekat pada diri seseorang (debitur) untuk membayarkan sejumlah sesuatu (uang) kepada seorang yang memiliki hak untuk itu (kreditur).

Suatu perikatan untuk tak dapat berbuat sesuatu dapat dipenuhi oleh seorang pihak ketiga berlawanan dengan kemauan si berpiutang. Jika si berpiutang ingin mempunyai kepentingan supaya perbuatannya dilakukan sendiri oleh si berhutang. Dalam ketentuan hutang piutang, hutang seseorang dapat dihapus karena beberapa hal, antara lain :

1. Pembayaran oleh orang yang berhutang atau oleh pihak ketiga.
2. Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan atau penitipan.
3. Pembaharuan hutang.
4. Kompensasi atau perjumpaan hutang.

5. Tentang pencampuran hutang.

Sebenarnya masalah hutang piutang dapat dikategorikan sebagai masalah perjanjian dimana menurut ketentuan pasal 1313 KUHPerdara bahwa suatu perjanjian adalah: “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.¹

Suatu perjanjian hutang piutang masuk dalam jenis perjanjian atas beban, yaitu perjanjian dimana terhadap prestasi yang satu selalu ada kontra prestasi pihak lain. Dimana kontra prestasinya bukan semata-mata merupakan pembatasan atas prestasi yang satu atau hanya sekedar menerima kembali atas prestasinya sendiri.

Jadi apabila sudah timbul suatu transaksi antara debitur dan kreditur dan muncul suatu kesepakatan bahwa si kreditur bersedia menyerahkan uangnya kepada debitur dengan imbalan suatu prestasi di kemudian hari, maka akan timbul hak dan kewajiban dari diri masing-masing pihak. Si kreditur memiliki kewajiban untuk menyerahkan uang yang telah diperjanjikan, dan mempunyai hak untuk menerima pengembalian uang tersebut. Sedangkan si debitur memiliki hak untuk menerima uang dari kreditur seperti yang telah diperjanjikan dan mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya. Dari hak dan kewajiban yang muncul maka terwujud suatu tanggung jawab yang harus dipegang teguh oleh masing-masing pihak.

Dalam suatu perjanjian hutang piutang, hal yang dilakukan oleh kedua belah pihak sebelum menyatakan sepakat adalah membuat suatu perjanjian tertulis terhadap prestasi yang diperjanjikan, dan dilakukan penandatanganan

¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2002, hal 338.

oleh keduanya. Jika debitur telah menerima uang maka kreditur membuat kuitansi yang berisi sejumlah uang yang dipinjamkan, dengan tujuan apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

Perjanjian hutang piutang dilakukan debitur dan kreditur dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu debitur dan kreditur yang berbentuk akta. Hal ini berarti bahwa apabila debitur dengan kreditur telah menandatangani isi perjanjian hutang piutang, berarti kedua belah pihak telah sepakat atau setuju untuk melakukan hutang piutang. Setelah terjadi kesepakatan tersebut maka antara debitur dan kreditur saling melakukan hak dan kewajiban secara timbal balik, dimana kewajiban kreditur menyerahkan uang dan hak debitur menerima uang. Sedangkan kewajiban debitur membayar secara mencicil sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan memberikan jaminan kepada kreditur sampai hutang tersebut dinyatakan lunas. Hak kreditur yaitu mendapat uang cicilan hutang dan surat jaminan hutang, disamping itu juga punya hak untuk menagih debitur apabila debitur terlambat atau bahkan tidak membayar hutang.

Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya membayar hutang terhadap kreditur, dan setelah dilakukan penagihan ternyata debitur tidak dapat membayar, maka kreditur berhak melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang dijaminkan ke kreditur sebagai persyaratan hutang. Barang-barang yang telah dijaminkan ke kreditur biasanya adalah berupa barang yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Adapun besarnya agunan atau jaminan dengan besarnya hutang yang wajib dibayarkan oleh debitur tidak sama. Terkadang debitur ada yang curang, dimana barang yang diagunkan sudah atau

sedang menjadi hipotik, sehingga kreditur dalam melaksanakan sita mengalami kesulitan.

Untuk melakukan sita jaminan ini memerlukan suatu keputusan yang adil dari lembaga hukum yang berwenang. Pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat hubungan perjanjian hutang piutang ini dapat meminta keputusan yang adil melalui Pengadilan Negeri untuk memutuskan sita jaminan terhadap barang tidak bergerak yang diagunkan atau dijaminakan kepada kreditur. Melalui putusan hakim Pengadilan Negeri, maka hakim akan memerintahkan tuganya sesuai dengan Pasal 65 yaitu :

1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang
2. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan/panggilan menurut cara-cara berdasarkan Undang-undang.
3. Melakukan penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada para pihak yang berkepentingan.²

Pelaksanaan sita jaminan tidak boleh dilakukan begitu saja oleh juru sita Pengadilan Negeri, tetapi harus melalui asas-asas sita jaminan yang telah ditetapkan. Yang pertama adalah sita jaminan hanya boleh satu kali pada waktu yang sama. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Yahya Harahap sebagai berikut: “Terhadap barang yang sama dan dalam waktu yang bersamaan hanya boleh satu kali diletakkan sita jaminan. Atau dengan kata lain, barang yang diatasnya telah diletakkan sita jaminan (conservatori beslag) pada waktu yang bersamaan tidak boleh disita untuk kedua kalinya”.³

² NN. *Pelatihan Tehnisi Yudisial Panitera dan Jurusita*. Jakarta 1997. Hal.23.

³ M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata, Permasalahan dan Penerapan Conservatori Beslag (Sita Jaminan)*. Gramedia, Jakarta, 1997. hal 133.

Prinsip yang lain yang perlu mendapat perhatian adalah asas yang melarang pensitaan terhadap barang yang sudah dijaminkan atau diagunkan. Sehingga pada setiap pembebanan sita jaminan, barang yang hendak diletakkan sita di atasnya harus secara murni bebas dari segala pembebanan. Barang itu harus bebas dari pensitaan serta harus bebas dari agunan.⁴

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa dalam hubungan hutang piutang antara kreditur dengan debitur apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar hutang maka kreditur mempunyai hak untuk mengambil alih barang tidak bergerak yang telah dijaminkan atau diagunkan kepada kreditur. Tetapi akan timbul suatu permasalahan apabila ternyata barang tidak bergerak yang diagunkan telah dihipotikkan kepada pihak lain. Dalam hal ini pengadilan tidak boleh memberikan keputusan sita jaminan. Hal ini akan menimbulkan tabrakan antara pemegang hipotik dengan pemegang sita jaminan. Dan penyelesaiannya sangat sulit dan memerlukan waktu yang lama. Sebab apabila kasus yang demikian, pengadilan tetap melakukan pensitaan maka sudah jelas keliru dan melanggar asas pensitaan. Bila barang yang hendak disita pada waktu yang bersamaan sedang dijadikan sebagai agunan atau hipotik, pensitaan sita jaminan harus ditolak.

Demikian juga kasus hutang piutang yang terjadi antara Hartono selaku Penggugat yang diwakili oleh Tri Prasetyo, SH. MH dan Suryadi, SH. Dengan suami istri yaitu tergugat I Joe Tjie Liang alias Bambang Lianggono dan tergugat II atas nama Ny. Liang Sioe Ing alias Susanna. Tergugat I dan Tergugat II telah berhutang kepada Penggugat secara bertahap dengan jumlah

⁴ *Ibid*, hal. 136.

akhir Rp. 130.000.000,00 yang dijanjikan dibayar dengan dua buah Giro Bilyet / cek mundur dan hutang piutang tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk tertulis / akta agar lebih tegas di depan Notaris Doddy Irawan Nusantara, SH. Dalam kenyataannya Pihak Tergugat sampai dengan batas pengembalian hutang tidak mengembalikan sehingga pihak Tergugat dianggap telah wanprestasi.

Permasalahannya antara Penggugat dan Tergugat yang karena perbedaan pandangan diantara keduanya sehingga tidak ditemukan kata mufakat dalam penyelesaiannya, maka kemudian pihak Penggugat mengajukan permasalahan hutang piutang ini ke Pengadilan Negeri Surakarta. Dalam menangani kasus hutang piutang ini, hakim akan mempertimbangkan aspek-aspek antara lain adalah pembuktian terjadinya hutang piutang yaitu antara lain adalah : bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Kalau dari pemeriksaan hakim/pengadilan tadi ternyata bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya dan apa yang dituntut di muka pengadilan itu memang bersandar pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku, maka pengadilan itu harus mengabulkan tuntutan Penggugat.⁵

Terhadap putusan hakim yang mengabulkan untuk melaksanakan sita jaminan, hakim akan memerintahkan juru sita untuk melaksanakan eksekusi. Apabila dalam pelaksanaannya mengalami hambatan akibat adanya pertentangan dari pihak Tergugat, maka hakim dapat meminta bantuan dari aparat bersenjata. Hal ini berarti putusan hakim mempunyai suatu kekuatan

⁵ R. Subekti. *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramita. Jakarta, 2005. Hal. 67.

eksekutorial, yaitu dapat dipaksakan dengan bantuan kekuatan umum yaitu Angkatan Bersenjata.

Dari Uraian tersebut di atas, penulis terdorong untuk mengadakan penelitian dengan judul: “PELAKSANAAN SITA JAMINAN TERHADAP BARANG MILIK TERGUGAT SEBAGAI JAMINAN DALAM SATU PERKARA PERDATA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)”.

B. Perumusan Masalah

Agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan skripsi mencapai tujuan yang diinginkan, maka perlu disusun perumusan masalah yang didasarkan pada uraian latar belakang masalah, dimana perumusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan sita jaminan terhadap barang milik tergugat sebagai jaminan dalam satu perkara perdata di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta ?
2. Kapan juru sita melaksanakan sita jaminan terhadap barang milik tergugat sebagai jaminan dalam satu perkara perdata ?
3. Bagaimanakah pelaksanaan sita jaminan terhadap barang milik tergugat sebagai jaminan dalam satu perkara perdata di wilayah hukum Pengadilan Surakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam perumusan masalah diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan sita jaminan terhadap barang milik tergugat sebagai jaminan dalam satu perkara perdata di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta.
2. Untuk mengetahui kapan juru sita melaksanakan sita jaminan terhadap barang milik tergugat sebagai jaminan dalam satu perkara perdata.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan sita jaminan terhadap barang milik tergugat sebagai jaminan dalam satu perkara perdata di wilayah hukum Pengadilan Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi penulis saja, tetapi juga memberikan manfaat bagi pihak lain secara positif. Menurut penulis manfaat tersebut meliputi:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya mengenai sita jaminan terhadap barang milik tergugat sebagai jaminan dalam satu perkara perdata.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat khususnya masyarakat yang mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri terkait dengan permasalahan sita jaminan terhadap barang milik tergugat sebagai jaminan dalam satu perkara perdata.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap khasanah ilmu hukum pada umumnya, dan pengembangan teori hukum terkait dengan proses peradilan perdata yang menyangkut tentang perkara sita jaminan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara yang dilakukan seorang peneliti dalam penyelidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode normatif sosiologis. Menurut Setiono, dalam konsep normatif sosiologis hukum adalah norma baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*), ataupun norma yang telah terwujudnya sebagai perintah yang eksplisit dan secara positif telah terumus jelas (*ius contitutum*) untuk menjamin kepastiannya, dan juga yang berupa norma yang merupakan produk dari seorang hakim (judgemens) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.⁶

Dalam penelitian ini yang dikaji adalah aspek-aspek hukum atas putusan hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam permasalahan sita jaminan terhadap barang tidak bergerak, dengan pelaksanaan keilmuan dan aturan hukum yang berlaku, serta dari sudut pandang sosial masyarakat

⁶ Setiono, *Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta, UNS, 2005, hal. 21-22.

dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat diketahui legalitas dari sita jaminan terhadap barang tidak bergerak yang dijaminakan atau diagunkan.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁷ Dengan jenis penelitian ini penulis ingin memberi gambaran seteliti mungkin dan secara menyeluruh tentang pelaksanaan sita jaminan terhadap barang milik tergugat sebagai jaminan dalam satu perkara perdata.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber hukum primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung pada nara sumber atau responden yang bersangkutan, dalam hal ini nara sumber yang dimaksud adalah Juru Sita Pengadilan Negeri Surakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data lain yang berhubungan dengan penelitian yang berupa bahan-bahan pustaka. Dalam hal ini menggunakan data berupa yurisprudensi.

4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data terdiri dari dua cara, yaitu :

a. Studi Pustaka

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hal. 10.

Metode studi pustaka adalah metode untuk mengumpulkan data-data berdasarkan pada benda-benda berupa tulisan, dilakukan dengan cara mencari, membaca, mempelajari dan, memahami data-data sekunder yang berhubungan dengan hukum sesuai permasalahan yang dikaji.

b. Penelitian Lapangan

Metode penelitian lapangan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang diteliti guna mendapatkan data primer dengan cara :

- 1) Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pengecekan berkas-berkas perkara yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji. Dalam hal ini observasi akan dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta.
- 2) Interview, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian deskriptif adalah dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari peraturan-peraturan, yurisprudensi dan literatur yang ada hubungannya dengan pembuktian alat bukti tertulis dalam suatu perkara hutang piutang kemudian dipadukan dengan pendapat responden di lapangan, dianalisis secara kualitatif dan dicari pemecahannya yang kemudian dapat ditarik kesimpulannya.

F. Sistematika Skripsi

Guna Mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi yang terkandung dalam skripsi ini, maka diadakan pembagian dalam bab-bab yang pada dasarnya untuk memudahkan pemahaman dan pengertian serta ruang lingkup dari skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit
 - 1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
 - a. Pengertian Perjanjian
 - b. Syarat Sahnya Perjanjian
 - c. Asas-asas Perjanjian
 - d. Berakhirnya Perjanjian
 - 2. Pengertian Perjanjian Kredit
 - 3. Para Pihak dalam Perjanjian Kredit
 - 4. Hubungan Antara Kreditur dan Debitur dalam Perjanjian Kredit

5. Hak-hak dan Kewajiban Kreditur serta Debitur

6. Pengertian Wanprestasi dan Sebab-sebab Terjadinya Wanprestasi

B. Tinjauan Tentang Jaminan

1. Pengertian Jaminan

2. Macam-macam Jaminan

3. Jaminan dengan Hak Tanggungan

C. Tinjauan Tentang Sita Jaminan

1. Pengertian Sita Jaminan

2. Objek Dalam sita jaminan

3. Syarat-syarat Barang yang Disita atau Diagunkan

4. Pelaksanaan Sita jaminan

D. Hubungan Antara Jaminan dengan Sita jaminan

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

B. Pembahasan

1. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan sita jaminan terhadap barang milik tergugat sebagai jaminan dalam satu perkara perdata di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta.

2. Kapan juru sita melaksanakan sita jaminan terhadap barang milik tergugat sebagai jaminan dalam satu perkara perdata.

3. Pelaksanaan sita jaminan terhadap barang milik tergugat sebagai jaminan dalam satu perkara perdata di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN